

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan Jkn-Kis Mandiri Di Kecamatan Ngadirojo

Bagas Yuwana Mukti¹, Warsini², Hendra Dwi Kurniawan³, Ditya Yankusuma⁴

^{1,2,3,4}STIKES Panti Kosala

Email: bagasyuwanam@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang. Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah program penting untuk akses kesehatan di Indonesia. Namun, pemahaman yang rendah tentang manfaat dan pendaftaran, terutama di Kecamatan Ngadirojo, menyebabkan rendahnya kepesertaan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam JKN-KIS Mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi dan akses layanan kesehatan secara merata. Tujuan Penelitian. Tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Mandiri di Kecamatan Ngadirojo. Desain Penelitian. Desain yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Subjek penelitian. Jumlah sempel pada penelitian ini 377 kepala keluarga yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur tiga faktor utama: pengetahuan, biaya, dan prosedur pendaftaran. Hasil Penelitian. menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ($OR=1,808$; $p=0,006$), biaya ($OR=1,578$; $p=0,033$), dan prosedur pendaftaran ($OR=1,665$; $p=0,017$) dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri. Masyarakat dengan pengetahuan baik, persepsi biaya terjangkau, dan pemahaman tentang prosedur pendaftaran yang mudah cenderung lebih banyak menjadi peserta. Kesimpulan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Ngadirojo. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan tentang program, persepsi biaya terjangkau, dan kemudahan pendaftaran berpengaruh signifikan terhadap partisipasi. Masyarakat dengan pengetahuan baik memiliki peluang 1,808 kali lebih besar untuk berpartisipasi, sedangkan yang menganggap biaya terjangkau dan pendaftaran mudah memiliki peluang 1,578 dan 1,665 kali lebih besar. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas untuk meningkatkan kepesertaan JKN-KIS Mandiri.

Kata Kunci: Biaya, Kepesertaan JKN, Pengetahuan, Prosedur Pendaftaran.

ABSTRACT

Background. The National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS) is an important program for healthcare access in Indonesia. However, low understanding of benefits and registration, especially in Ngadirojo District, leads to low participation. This study analyzes the factors that influence public interest in participating in JKN-KIS Mandiri, with the hope of increasing participation and access to healthcare services evenly. Research Objectives. The aim is to analyze the factors that influence public interest in participating in the National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS) Mandiri in Ngadirojo District. Research Design. The design used is quantitative with a cross-sectional approach.

Research Subjects. The number of samples in this study was 377 heads of families selected using a purposive sampling technique. Data were collected through a questionnaire that measured three main factors: knowledge, costs, and registration procedures. Research Results. showed a significant relationship between knowledge ($OR=1.808$; $p=0.006$), costs ($OR=1.578$; $p=0.033$), and registration procedures ($OR=1.665$; $p=0.017$) and JKN-KIS Mandiri participation. People with good knowledge, perceptions of affordable costs, and understanding of easy registration procedures were more likely to participate. Conclusion: This study analyzed factors influencing community interest in JKN-KIS Mandiri participation in Ngadirojo District. The results showed that knowledge about the program, perceptions of affordable costs, and ease of registration significantly influenced participation. People with good knowledge were 1.808 times more likely to participate, while those who perceived affordable costs and easy registration were 1.578 and 1.665 times more likely, respectively. These findings emphasize the importance of improving understanding and accessibility to increase JKN-KIS Mandiri participation..

Keywords: Cost, JKN Participation, Knowledge, Registration Procedure.

A. PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN-KIS diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Ada 3 (tiga) alasan utama menjadi peserta JKN-KIS, yaitu *protection* (perlindungan), *sharing* (gotong royong) dan *compliance* (kepatuhan). Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang jenis jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang pembayarannya oleh Pemerintah. Sedangkan Non-PBI adalah Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan (BP) Bukan Pekerja (BP) (Niha, 2019).

Sistem Kesehatan Nasional, yang seterusnya disingkat SKN adalah pengurusan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN yang menyatakan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial ini diberikan melalui penyelenggaraan jaminan. Penerapan JKN di Indonesia mendorong perubahan model pembayaran dari model *fee for service* saja menjadi dua sistem pembayaran yaitu menjadi sistem pembayaran langsung *fee for service* dan juga sistem pembayaran kapitasi. Penerapan sistem ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian tentang pembayaran kapitasi terhadap dokter keluarga, menemukan bahwa adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang baik. Perbedaan pokok yang berakibat langsung kepada pasien adalah sistem pelayanan obat. Pada sistem kapitasi jasa, pasien mendapatkan resep dan obat diambil di apotek yang jaraknya relatif jauh dari dokter, sehingga pasien masih mengeluarkan biaya transportasi (Imanuddin, 2021).

Menurut Kemenkes (2022) standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan JKN terbagi beberapa kelompok tarif yang meliputi. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per kapita perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur, meliputi seluruh sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun non-medis.

Program jaminan kesehatan dijalankan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial, prinsip ekuitas dan sistemnya berupa sistem gotong royong dimana peserta mampu dan sehat akan membantu peserta yang miskin dan sakit (Kemenkes, 2023). Namun di kalangan masyarakat muncul persepsi yang masih kurang baik dengan program JKN. Hal ini dapat disebabkan karena pengetahuan dan sosialisasi tentang program BPJS kesehatan masih rendah sehingga pelaksanaan program BPJS belum dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat. Kenyataan lainnya bahwa kepesertaan BPJS belum keseluruhan mencakup masyarakat terutama para pekerja informal (buruh atau petani) ataupun masyarakat di pedesaan terpencil dikarenakan belum seluruhnya terdaftar atau memiliki kartu BPJS (Hapsari et al, 2021).

Kepesertaan dalam JKN dipengaruhi oleh minat masyarakat. Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan yang dirasa atau tidak dirasakan berupa keinginan hal tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat dalam pelayanan kesehatan, diantaranya adalah pengetahuan, biaya dan prosedur pendaftaran. Tiga faktor tersebut sering dikaitkan oleh peneliti lain dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan program pelayanan kesehatan (Hapsari et al, 2021).

Program JKN tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014 yang dibentuk sesuai UU No. 24/2011 tentang BPJS Pasal 14 yang mengamanatkan bahwa tiap orang termasuk orang asing yang bekerja dan tinggal di Indonesia minimal selama 6 bulan wajib mengikuti JKN. Karena kepesertaan JKN wajib bagi seluruh WNI maka ditargetkan 257,5 juta penduduk Indonesia untuk mengikuti JKN pada 1 Januari 2019 guna mencapai *Universal Health Coverage* (UHC). UHC adalah sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tiap warga negara memiliki akses adil dan setara terhadap healthcare yang dibutuhkan, berkualitas tinggi, dan layak secara finansial, termasuk promosi, pengobatan, pencegahan, dan layanan pemulihan (Permenkes RI, 2018). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 248,77 juta jiwa per 31 Desember 2022. Jumlah tersebut setara dengan 90,73% dari seluruh penduduk Indonesia yang sebanyak 274,20 juta jiwa pada 2022 yang artinya belum 100% mencakup keseluruhan warga negara Indonesia. Sehingga dalam mencapai UHC ini, masih didapati data warga Indonesia yang tidak mengikutsertakan dirinya sebagai peserta JKN (Lubis, 2023).

Minimnya pengetahuan umum tentang JKN masih membingungkan banyak orang, bahkan mereka tidak tahu tentang JKN. Motif di balik JKN juga berbeda. Sebab, masih banyak masyarakat Indonesia yang mendukung atau tidak mendukung JKN yang diwajibkan oleh undang-undang. Penelitian Purwaningsih (2016) yang membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam JKN. Hasil penelitian yang didapatkan oleh Purwaningsih (2016) bahwa program JKN diikuti oleh sebagian responden yang berpengetahuan baik (84%). Masyarakat yang menganggap baik untuk mengikuti JKN adalah masyarakat yang pengetahuannya baik mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan didukung dengan pendapatan yang cukup. Sedangkan masyarakat yang akan mempertimbangkan untuk mengikuti JKN adalah masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan baik mengenai JKN dan tidak didukung oleh pendapatan yang cukup.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2018) menjelaskan bahwa penyebab rendahnya kepesertaan JKN pada pekerja di sektor informal tepatnya di kawasan perkampungan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat setempat, kurangnya sosialisasi pada masyarakat, minimnya media promosi kesehatan dan kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya JKN serta pendidikan masyarakat yang sebagian hanya tamat SD atau pun tamat SMP.

Sebanyak 10 KK belum memiliki kartu JKN, sebanyak 40% responden tidak mengetahui cara mengurus kartu JKN-KIS dan 30% responden mengatakan bahwa terlalu besar biaya yang harus di keluarkan untuk pembayaran iuran perbulannya. Ada juga yang mengatakan bahwa mendaftar dan menjadi anggota peserta JKN akan mengalami kerugian sebab apabila dalam satu keluarga tidak ada yang sakit namun sudah terdaftar sebagai anggota peserta JKN maka satu keluarga tersebut akan tetap membayar iuran perbulannya.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan kabupaten Wonogiri sebagai wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah. Wonogiri adalah salah satu kota kabupaten di Jawa Tengah yang berada di bagian paling selatan. Kabupaten Wonogiri memiliki 25 kecamatan yang terdiri dari 43 kelurahan dan 251 desa. Jumlah penduduk di kabupaten ini pada tahun 2019 adalah sebanyak 959.490 jiwa dengan luas wilayah mencapai 1.822,36 km². Dari penduduk sebesar itu sebagian besar (59,45%) merupakan penduduk berusia produktif (15-59 tahun) sisanya sebesar 19,9% berusia 0 - 14 tahun dan 20,86% berusia 60 tahun ke atas. Pemerintah kabupaten Wonogiri menargetkan seluruh warganya yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengikuti program BPJS Kesehatan PBI. Terdapat 488.000 warga Kabupaten Wonogiri telah diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun jumlah kepesertaan masyarakat kabupaten Wonogiri dalam masyarakat belum 100% (Permenkes, 2020).

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, (2024). Kabupaten Wonogiri menjadi pilihan objek oleh peneliti karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sebanyak 62.586 jiwa, di Kecamatan Ngadirojo dibagi menjadi 2 (dua) kelurahan yang terdiri dari Ngadirojo Lor dan Ngadirojo Kidul. Terdapat 21.999 jumlah KK (Kepala Keluarga) dalam Kecamatan Ngadirojo. Jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan untuk

tahun 2021 sebanyak 60.601 jiwa, tahun 2022 sebanyak 60.479 jiwa, dan untuk tahun 2023 sebanyak 59.977 jiwa. Sedangkan penduduk yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan sebanyak 2.609 jiwa. Sesuai dengan data yang diperoleh dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang sudah terdaftar mengalami penurunan setiap tahunnya belum diketahui faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat. Jadi, berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pengguna BPJS lebih banyak dari pada yang belum menggunakan BPJS.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Jumlah sampel pada penelitian ini 377 kepala keluarga yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur tiga faktor utama: pengetahuan, biaya, dan prosedur pendaftaran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabulasi silang hubungan faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN

Tabel 4.5 Tabulasi silang hubungan faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN

Faktor	Kinerja		OR	CI 95%		p value
	Minat	Tidak		Lower	Upper	
Baik	153	79	1,808	1,183	2,762	0,006
Kurang baik	75	70				
Jumlah	228	149				

Sumber: olah data spss

Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri ($p=0,006$). Masyarakat yang menilai faktor pengetahuan baik berpeluang 1808 memiliki minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri, dibanding dengan masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik ($OR=1.808$; CI 95%:1,183- 2,762). Dapat dilihat pada data yang didapatkan, dari 232 masyarakat yang menilai baik, 145 masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik, terdapat 153 masyarakat yang berminat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri.

Tabulasi silang hubungan faktor biaya dengan kepesertaan JKN

Tabel 4.6 Tabulasi silang hubungan faktor biaya dengan kepesertaan JKN

Faktor Biaya	Kinerja		OR	CI 95%		p value
	Minat	Tidak		Lower	Upper	
Mampu	146	79	1,578	1,036	2,402	0,033
Kurang	80	70				
Mampu						

Jumlah	228	149
Sumber: olah data spss		

Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor biaya dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri ($p=0,033$). Masyarakat yang menilai faktor biaya baik berpeluang 1,578 memiliki minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri, dibanding dengan masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik ($OR=1.578$; CI 95%:1.036- 2.402). Dapat dilihat pada data yang didapatkan sebanyak 225 dari masyarakat yang menilai baik, 152 masyarakat yang menilai faktor biaya tidak baik, terdapat 146 masyarakat yang berminat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri.

Tabulasi silang hubungan faktor prosedur pendaftaran dengan kepesertaan JKN**Tabel 4.7 Tabulasi silang hubungan faktor prosedur pendaftaran dengan kepesertaan JKN**

Prosedur Pendaftaran	Kinerja		OR	CI 95%		p value
	Minat	Tidak		Lower	Upper	
Dipahami	146	77	1,665	1,094	2,534	0,017
Tidak	82	72				
Dipahami						
Jumlah	228	149				

Sumber: olah data spss

Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri ($p=0,017$). Masyarakat yang menilai faktor prosedur pendaftaran yang mudah dipahami berpeluang 1,665 memiliki minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri, dibanding dengan masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik ($OR=1.665$; CI 95%:1.094- 2,534). Dapat dilihat pada data yang didapatkan, dari 223 masyarakat yang menilai baik, 154 masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik, terdapat 146 masyarakat yang berminat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri.

Pembahasan:

1. Hubungan antara faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN

Pengetahuan adalah informasi dan pemahaman yang membantu seseorang memahami dunia dan membuat keputusan, menurut Donsu (2017), menyatakan bahwa pengetahuan merupakan domain penting dalam pembentukan perilaku. Pengetahuan tidak hanya sekadar informasi, tetapi juga mencakup pemahaman dan kemampuan untuk mengaplikasikan informasi tersebut dalam konteks yang berbeda. Dengan kata lain, pengetahuan adalah informasi yang telah dipadukan dengan pemahaman dan potensi

untuk bertindak. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang secara statistik signifikan antara faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri Masyarakat yang menilai faktor pengetahuan baik berpeluang 1808 memiliki minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri, dibanding dengan masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik ($OR=1,808; CI95\%: 1,183-2,762, p=0,006$). Dapat dilihat pada data yang didapatkan, dari 232 responden yang memiliki pengetahuan baik, sedangkan 145 responden yang memiliki pengetahuan tidak baik, terdapat 153 masyarakat yang berminat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Ngadirojo yang memiliki pengetahuan baik tentang program JKN cenderung lebih banyak yang menjadi peserta dibandingkan dengan yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan seseorang mengenai manfaat, prosedur, dan cakupan program JKN, maka semakin tinggi kemungkinan untuk ikut serta dalam program tersebut.

Hasil serupa ditemukan pada penelitian Hapsari et al., (2021), dapat diketahui bahwa sebagian besar 64 orang (78%) dari 93 responden cukup berminat untuk menjadi peserta JKN-KIS Mandiri yang memiliki pengetahuan cukup baik, meskipun ada juga sebagian kecil 11 orang (13,4%) yang tidak berminat tetapi pengetahuan yang dimilikinya cukup baik. Hasil uji statistik rank spearman kedua variabel ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dengan minat masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS Mandiri di Desa Pandanharum Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan nilai $p=0,010$ (dimana $p < 0,05$).

2. Hubungan antara faktor biaya dengan kepesertaan JKN

Biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan barang dan jas, menurut Mulyadi (2018), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya juga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber (ekonomi) yang dikorbankan (terjadi dan akan terjadi) untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan suatu dana untuk mencapai proses penghasilan atau laba dan sebagai pengorbanan suatu dana untuk menghasilkan aset yang sifatnya mengurangi penghasilan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang secara statistik signifikan antara faktor biaya dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri. Masyarakat yang menilai faktor biaya baik berpeluang 1,578 memiliki minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri, dibanding dengan masyarakat yang menilai faktor biaya tidak baik ($OR=1.578; CI 95\%: 1.036- 2.402, p=0,033$). Dapat dilihat pada data yang didapatkan sebanyak 225 dari masyarakat yang menilai biaya baik, 152 masyarakat yang menilai faktor biaya tidak baik, terdapat 146 masyarakat yang berminat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Ngairojo yang menganggap biaya iuran JKN terjangkau lebih banyak yang menjadi peserta JKN dibandingkan dengan masyarakat yang menganggap biaya JKN mahal. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap keterjangkauan biaya berperan dalam keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

program JKN.

Sedangkan penelitian ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Hapsari et al, (2021), bahwa ada hubungan antara faktor biaya dengan kepesertaan JKN, sebagian besar 38 orang (77,6%) dari 93 responden yang cukup berminat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri merasa biaya cukup memberatkan, meskipun ada sebagian kecil yang berminat menjadi peserta JKN-KIS walaupun biaya dirasa cukup memberatkan, ditunjukkan dengan nilai $p=0,030$.

3. Hubungan antara faktor prosedur pendaftaran dengan kepesertaan JKN

Prosedur pendaftaran adalah proses mendaftarkan diri untuk mengikuti suatu program, menurut Prasetyo & Jati (2021), Prosedur pendaftaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau tahapan yang terstandardisasi dan sistematis yang harus diikuti oleh individu atau entitas untuk secara resmi mencatatkan atau mengajukan diri pada suatu sistem, layanan, program, atau lembaga. Melalui prosedur pendaftaran, organisasi dapat mengelola data peserta, memverifikasi identitas, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kejelasan dan efisiensi prosedur pendaftaran sangat krusial, karena dapat memengaruhi pengalaman pengguna, kepatuhan terhadap aturan, serta validitas data yang terkumpul (Anggraini & Sari, 2020). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang secara statistik signifikan antara faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri. Masyarakat yang menilai faktor prosedur pendaftaran baik berpeluang 1,665 memiliki minat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri, dibanding dengan masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik ($OR=1.665$; $CI 95\%: 1.094- 2,534$, $p=0,017$). Dapat dilihat pada data yang didapatkan, dari 223 masyarakat yang menilai baik, 154 masyarakat yang menilai faktor pengetahuan tidak baik, terdapat 146 masyarakat yang berminat menjadi peserta JKN-KIS Mandiri. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Ngadirojo menyatakan bahwa prosedur pendaftaran yang mudah dipahami cenderung lebih banyak menjadi peserta dibandingkan dengan masyarakat yang menganggap prosedurnya rumit. Hal ini mengindikasikan bahwa penyederhanaan dan sosialisasi prosedur pendaftaran berpotensi meningkatkan kepesertaan dalam program JKN.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Hapsari et al, (2021), dapat diketahui bahwa dari 100 responden terdapat mengenai prosedur pendaftaran terdapat 69 orang (88,5%) yang berminat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang menganggap prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan tidaklah sulit, meskipun ada sebagian kecil 15 orang (68,2%) yang berminat beranggapan bahwa prosedur pendaftaran sulit. Hasil uji statistik chi-square kedua variabel ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara prosedur pendaftaran dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan nilai $p = 0,000$ (dimana $p < 0,05$).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentang Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Kepesertaan JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Ngadirojo, mengenai hubungan antara faktor pengetahuan, biaya, dan prosedur pendaftaran dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Ngadirojo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan yang secara statistik signifikan antara faktor pengetahuan dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri ($OR=1,808$; $CI95\%:1,183-2,762$; $p=0,006$). Masyarakat dengan pengetahuan yang baik tentang program JKN memiliki peluang 1,808 kali lebih besar untuk menjadi peserta JKN-KIS Mandiri dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan kurang baik.
2. Terdapat hubungan yang secara statistik signifikan antara faktor biaya dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri ($OR=1,578$; $CI 95\%:1,036-2,402$; $p=0,033$). Masyarakat yang menganggap biaya iuran JKN terjangkau memiliki peluang 1,578 kali lebih besar untuk menjadi peserta JKN-KIS Mandiri dibandingkan dengan masyarakat yang menganggap biaya tidak terjangkau.
3. Terdapat hubungan yang secara statistik signifikan antara faktor prosedur pendaftaran dengan kepesertaan JKN-KIS Mandiri ($OR=1,665$; $CI 95\%:1,094-2,534$; $p=0,017$). Masyarakat yang menilai prosedur pendaftaran mudah memiliki peluang 1,665 kali lebih besar untuk menjadi peserta JKN-KIS Mandiri dibandingkan dengan masyarakat yang menganggap prosedur pendaftaran sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Sari, N. (2020). Analisis Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 112-120.
- Badan Pusat Statistik (2024). Tentang banyaknya peserta BPJS kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Profinsi Jawa Tengah, 2024. <https://wonogirikab.bps.go.id>
- Hapsari, K. N. (2021). Analisis Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan Bpjs Kesehatan Di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Imanuddin, B. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dengan Program Kepesertaan JKN-KIS Di Wilayah Kerja Puskesmas Bantul Tahun 2021. *Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB*.
- Mulyadi. (2018). Akuntansi Biaya. Edisi ke-5, Cetakan ke-14. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Niha, M. R. (2019). Hubungan Karakteristik Individu Dan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (Jkn-Kis) Dengan Status Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jkn-Kis Di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 2(3), 7-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33578/mbi>.
- PERMENKES. (2022). *tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Oprasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Minik Pemerintahan Daerah*. <https://permenkes.co.id>.

- PERMENKES. (2023). *Tentang Jaminan Kesehatan*. Retrieved from <https://permenkes.co.id>.
- Prasetyo, A., & Jati, I. S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Online Berbasis Web pada Pusat Kebugaran. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(1), 1-8.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.